

DRAFT

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ...

TENTANG

UNIT PELAPORAN, PRODUSEN DATA SPASIAL,
DATA SPASIAL YANG DIPRODUKSI, DAN FORMAT DATA SPASIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi satu peta kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan bagian dari kebijakan Satu Peta Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dinilai perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan dan Perikanan tentang Unit Pelaporan, Produsen Data Spasial, Data Spasial yang Diproduksi, dan Format Data Spasial di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1788);
 7. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 27 Tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENTANG UNIT PELAPORAN, PRODUSEN DATA SPASIAL, DATA SPASIAL YANG

DIPRODUKSI, DAN FORMAT DATA SPASIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- KESATU : Menetapkan Unit Pelaporan, Produsen Data Spasial, Data Spasial yang Diproduksi, dan Format Data Spasial di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Unit Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, memiliki tugas melaporkan data spasial di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kantor Staf Presiden dalam rangka percepatan penyelesaian Kebijakan Satu Peta.
- KETIGA : Data spasial yang Diproduksi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihasilkan oleh Produsen Data.
- KEEMPAT : Data spasial yang dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA divalidasi secara berjenjang oleh Unit Data Eselon I dan Unit Data Kementerian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KELIMA : Pengelolaan data spasial sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilakukan dengan mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Lembar Pengesahan			
No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Plt.Kapusdatin		
2.	Karo Hukum		

SAKTI WAHYU TRENGGONO

DRAFT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR

TENTANG PENETAPAN UNIT PELAPORAN, PRODUSEN DATA SPASIAL DATA SPASIAL, DAN FORMAT DATA SPASIAL YANG DIPRODUKSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. DEFINISI

1. Unit Pelaporan adalah unit kerja yang bertugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi, dan kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan.
2. Unit Data Kementerian adalah unit kerja yang bertugas di bidang pengelolaan Data dan berwenang untuk menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Unit Data Eselon I adalah unit kerja yang bertugas di bidang Data dan bertindak selaku koordinator pendataan pada Unit Kerja Eselon I.
4. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PRODUSEN DATA SPASIAL, DATA SPASIAL YANG DIPRODUKSI, DAN FORMAT DATA SPASIAL

No	Unit Data Eselon I	Produsen Data	Data Spasial yang Diproduksi	Format Data
I	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap			
1	Sekretariat Ditjen	Direkotrat Pelabuhan Perikanan	Peta Pelabuhan Perikanan	<i>Shapefile</i>
2	Perikanan Tangkap	Direkotrat Pelabuhan Perikanan	Peta Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	<i>Shapefile</i>
3		Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Peta Jenis Keanekaragaman Hayati Laut di WPPNRI	<i>Shapefile</i>
4		Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan	Peta Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan	<i>Shapefile</i>
5		Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan	Peta Sebaran Galangan Kapal Perikanan	<i>Shapefile</i>
6		Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan	Peta Sebaran Alat Penangkapan Ikan	<i>Shapefile</i>
II		Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya		
7	Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	Peta Lahan Pembudidaya Ikan	<i>Shapefile</i>
8		Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	Peta Sebaran Posikandu	<i>Shapefile</i>
9		Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	Peta Sebaran Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana	<i>Shapefile</i>
10		Direktorat Pakan dan Obat Ikan	Peta Sebaran Produsen Pakan Ikan	<i>Shapefile</i>
11		Direktorat Pakan dan Obat Ikan	Peta Sebaran Produsen Obat Ikan	<i>Shapefile</i>
12		Direktorat Perbenihan	Peta Sebaran Ketersediaan Calon Induk (komoditas ikan, jumlah)	<i>Shapefile</i>
13		Direktorat Perbenihan	Peta Sebaran Bantuan Pemerintah Perbenihan Ikan Air Tawar	<i>Shapefile</i>
14		Direktorat Perbenihan	Peta Sebaran Bantuan Pemerintah Perbenihan Ikan Air Payau	<i>Shapefile</i>

15		Direktorat Perbenihan	Peta Sebaran Bantuan Pemerintah Perbenihan Ikan Air Laut	<i>Shapefile</i>
16		Direktorat Perbenihan	Peta Sebaran UPR (Unit Pembenihan Rakyat)	<i>Shapefile</i>
17		Direktorat Perbenihan	Peta Sebaran Unit Pembenihan Ikan Air Tawar	<i>Shapefile</i>
18		Direktorat Perbenihan	Peta Sebaran Unit Pembenihan Ikan Air Payau	<i>Shapefile</i>
19		Direktorat Perbenihan	Peta Sebaran Unit Pembenihan Ikan Air Laut	<i>Shapefile</i>
20		Direktorat Produs	Peta Sebaran Bantuan Pemerintah Rumput Laut	<i>Shapefile</i>
21		Direktorat Produs	Peta Sebaran Bantuan Pemerintah Bioflok	<i>Shapefile</i>
22		Direktorat Produs	Peta Sebaran Bantuan Pemerintah Asuransi	<i>Shapefile</i>
23		Sekretariat Ditjen DJPB	Peta Wilayah Kerja UPT DJPB	<i>Shapefile</i>
III	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut			
24	Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan	<i>Shapefile</i>
25		Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Peta Sebaran Biota Laut Dilindungi	<i>Shapefile</i>
26		Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Peta Sebaran Kompak, berbasis administrasi	<i>Shapefile</i>
27		Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Peta Sebaran dan Status Pengelolaan 20 Jenis Ikan Terancam Punah	<i>Shapefile</i>
28		Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peta Masyarakat Hukum Adat	<i>Shapefile</i>
29		Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peta Pulau-pulau Kecil Terluar	<i>Shapefile</i>
30		Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peta Pulau-pulau Kecil	<i>Shapefile</i>
31		Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peta Nama Pulau yang sudah tersertifikasi	<i>Shapefile</i>
32		Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peta Sebaran Penanaman Mangrove	<i>Shapefile</i>
33		Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peta Sebaran Penanaman Vegetasi Pantai	<i>Shapefile</i>

34	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peta Sebaran Pelindung Pantai	<i>Shapefile</i>
35	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peta Gasetir Pulau Indonesia	<i>Shapefile</i>
36	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peta Sebaran Bantuan Sarana dan Prasarana di Pesisir dan Pulau - pulau Kecil	<i>Shapefile</i>
37	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peta Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil oleh PMA	<i>Shapefile</i>
38	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peta Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	<i>Shapefile</i>
39	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peta Kawasan Terabrasi	<i>Shapefile</i>
40	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peta Rawan Banjir di Kawasan Pesisir	<i>Shapefile</i>
41	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	Peta Rencana Tata Ruang Laut	<i>Shapefile</i>
42	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	Peta Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	<i>Shapefile</i>
43	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional	<i>Shapefile</i>
44	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu	<i>Shapefile</i>
45	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	Peta Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	<i>Shapefile</i>
46	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	<i>Shapefile</i>
47	Direktorat Jasa Kelautan	Peta Lahan Garam dan Gudang Garam	<i>Shapefile</i>
48	Direktorat Jasa Kelautan	Peta Badan Reklamasi Pantai	<i>Shapefile</i>
49	Direktorat Jasa Kelautan	Peta Bantuan Wisata Bahari	<i>Shapefile</i>
50	Sekretariat Ditjen PRL	Peta Wilayah Kerja UPT PRL	<i>Shapefile</i>
51	BPSPL Makassar	Peta Kawasan Konservasi Perairan (Sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
52	BPSPL Makassar	Peta Lokasi Transplantasi Karang (Belum terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>

53	BPSPL Makassar	Peta Usulan Lokasi Transplantasi Karang (Belum terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
54	BPSPL Makassar	Peta Sebaran Kompak (Sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
55	BPSPL Makassar	Peta Sebaran bantuan Kompak (Sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
56	BPSPL Makassar	Peta Sebaran Mamalia Laut terdampar (Sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
57	BPSPL Makassar	Peta Kelompok Pembibitan Mangrove (Belum terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
58	BPSPL Makassar	Peta Wisata Mangrove (Belum terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
59	BPSPL Makassar	Peta Usulan Lokasi Penanaman Mangrove 2022-2024 (Sudah terkonfirmasi di P4K)	<i>Shapefile</i>
60	BPSPL Makassar	Peta Kelompok Penggiat Mangrove (Sudah terkonfirmasi di P4K)	<i>Shapefile</i>
61	BPSPL Makassar	Peta Lokasi Penangkapan Anemon (Belum terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
62	BPSPL Pontianak	Peta Penetapan 5 Kawasan Konservasi Perairan* (sudah di terkonfirmasi KemenKP)	<i>Shapefile</i>
63	BPSPL Pontianak	Sebaran Biota Laut Terdampar* (sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
64	BPSPL Pontianak	Lokasi Pendaratan Penyu* (sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
65	BPSPL Pontianak	Data Base terumbu Karang* (sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
66	LKKPN Pekan Baru	Peta Pemanfaatan Kawasan Konservasi*	<i>Shapefile</i>
67	LKKPN Pekan Baru	Data Sebaran Updating dan Monitoring Ekosistem di Lokasi KKP* (sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
68	LKKPN Pekan Baru	Peta Kemunculan Biota Laut yg dilindungi di lokasi KKP* (sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>

69	LKKPN Pekan Baru	Peta Sebaran Kompak * (sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
70	LKKPN Pekan Baru	Lokasi Pendaratan Penyu* (sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
71	LPSPL Sorong	Biota Laut terdampar* (sudah melaporkan di KKHL)	<i>Shapefile</i>
72	LPSPL Sorong	Sebaran Biota yang di lindungi* (sudah melaporkan di KKHL)	<i>Shapefile</i>
73	LPSPL Sorong	Lokasi Pendaratan Penyu* (sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
74	LPSPL Sorong	Peta Sebaran Kompak * (sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
75	BPSPL Denpasar	Peta lokasi penangkaran karang (budidaya/pengusaha) (sudah dilaporkan ke KKHL)	<i>Shapefile</i>
76	BPSPL Denpasar	Peta data monitoring karang/mangrove/lamun d bbrp titik d wilayah kerja (sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
77	BPSPL Denpasar	Peta Sebaran Kompak * (sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
78	BPSPL Denpasar	Lokasi Pendaratan Penyu* (sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
79	BPSPL Denpasar	Biota Laut terdampar* (sudah melaporkan di KKHL)	<i>Shapefile</i>
80	BPSPL Denpasar	Sebaran Biota yang di lindungi* (sudah melaporkan di KKHL)	<i>Shapefile</i>
81	BPSPL Padang	Peta Kawasan Konservasi Perairan (Ada perbaikan zona) (Belum terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
82	BPSPL Padang	Peta Kejadian Mamalia terdampar (Belum terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>

83		BPSPL Padang	Peta Sebaran Kehati (Lola, Kima, Teripang, Sidat, Kima, Kuda Laut) (Belum terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
84		BPSPL Padang	Lokasi Pantai Peneluran Penyu (Belum terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
85		BPSPL Padang	Lokasi Stock Senter Karang (Belum terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
86		BPSPL Padang	Peta Sebaran Kompak (Belum terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
87		BKKPN Kupang	Peta Lokasi Monitoring Ekosistem Pesisir (terumbu karang, lamun, mangrove) (Sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
88		BKKPN Kupang	Peta Lokasi Kemunculan Biota Laut Dilindungi (Sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
89		BKKPN Kupang	Peta Lokasi Biota Laut Dilindungi Terdampar (Sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
90		BKKPN Kupang	Peta Lokasi Wisata Selam (Sudah terkonfirmasi di KKHL)	<i>Shapefile</i>
IV	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
91	Sekretariat Ditjen Pengawasan	Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	Peta Aktivitas Kapal Perikanan	<i>Shapefile</i>
92	Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Peta Kerawanan IUU Fishing	<i>Shapefile</i>
93		Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Peta Wilayah Kerja UPT PSDKP	<i>Shapefile</i>
V	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan			
94	Sekretariat Ditjen Penguatan Daya Saing Produk	Sekretariat Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Peta Wilayah Kerja UPT PDSPKP	<i>Shapefile</i>

	Kelautan dan Perikanan			
VI	Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			
95	Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Pusat Riset Kelautan	Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)	<i>Shapefile</i>
96		Pusat Riset Kelautan	Peta Karakteristik Oceanografi	<i>Shapefile</i>
97		Pusat Riset Kelautan	Peta Potensi Sumber Daya Arkeologi Maritim	<i>Shapefile</i>
98		Pusat Riset Kelautan	Peta Kerentanan Pesisir	<i>Shapefile</i>
99		Pusat Riset Kelautan	Peta Perkiraan Daerah Penangkapan Ikan	<i>Shapefile</i>
100		Pusat Riset Kelautan	Peta Kelayakan/ Kesesuaian Lahan Perikanan Budidaya	<i>Shapefile</i>
101		Pusat Riset Kelautan	Peta Sumberdaya Ikan Pelagis	<i>Shapefile</i>
102		Pusat Riset Kelautan	Peta Sumberdaya Ikan Demersal	<i>Shapefile</i>
103		Pusat Riset Kelautan	Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Darat	<i>Shapefile</i>
104		Sekretariat Ditjen BRSDM	Peta Wilayah Kerja UPT DAN STP/SUPM/POLTEK BRSDM	<i>Shapefile</i>
105		Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Peta Sebaran Peserta didik	<i>Shapefile</i>
106		Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Peta Sebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<i>Shapefile</i>
107		Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Peta Sebaran Lulusan	<i>Shapefile</i>
108	Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Peta Sebaran Serapan Lulusan	<i>Shapefile</i>	
109	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	Peta Sebaran Purnawidya Pelatihan (Alumni Pelatihan)	<i>Shapefile</i>	
110	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	Peta Sebaran Kelompok yang disuluh	<i>Shapefile</i>	
111	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	Peta Sebaran Penyuluh	<i>Shapefile</i>	

112		Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3)	Peta Tambak (http://sipetak.brpbap3maros.com/)	<i>Shapefile</i>
VII	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan			
113	Sekretariat Badan Karantina Ikan,	Pusat Karantina Ikan	Peta Sebaran Penyakit Ikan	<i>Shapefile</i>
114	Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Sekretariat BKIPM	Peta Wilayah Kerja UPT BKIPM	<i>Shapefile</i>

C. Pengelolaan Data Spasial

1. Pengumpulan Data Spasial atas Permohonan Unit Data Kementerian

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		UNIT DATA KEMENTERIAN (PUSDATIN)	UNIT ESELON I	PRODUSEN DATA	Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	
1	Pusdatin mengirimkan surat permohonan data ke Unit Eselon I dan menyampaikan link direktori untuk pengumpulan data spasial di satupeta.kkp.go.id				- Direktori pengumpulan data	1	Surat	Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan data spasial yang sudah tersedia sebelumnya
2	Unit Eselon I menerima surat permohonan data dari Pusdatin dan melakukan pengecekan ketersediaan data yang diminta				Surat	1	Surat	Jelas
3	Unit Data Eselon 1 mengirim surat permohonan data ke Produsen data dan Produsen data melakukan pengecekan data yang diminta				Surat	1	Surat	Apabila Produsen Data memiliki data yang diminta, Produsen data bersurat dan memberikan data yang diminta kepada unit eselon I
4	Produsen data menyampaikan ke Unit Eselon I bahwa data yang diminta tersedia				Surat	1	Surat	Jelas
5	Unit Eselon I mengirim surat balasan dan melakukan upload data spasial, kamus data spasial, dan metadata spasial yang diminta Pusdatin ke satupeta.kkp.go.id sesuai dgn direktori yang disampaikan dalam surat.				- Surat - Data spasial - kamus data spasial - metadata spasial	1	-Surat - Data spasial - kamus data spasial - metadata spasial	Jelas
6	Pusdatin melakukan pengecekan terhadap data spasial, kamus data spasial, dan metadata spasial yang diupload oleh unit Unit Eselon I apakah sudah sesuai standar yang ditetapkan atau belum				- Data spasial - kamus data spasial - metadata spasial	2	- Data spasial - kamus data spasial - metadata spasial	Jika data spasial tidak sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan, maka Pusdatin dan Unit Unit Eselon I perlu melakukan koordinasi lebih lanjut. jika sudah sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan maka pusdatin akan melakukan konfirmasi status publikasi data
7	Pusdatin dan Unit Eselon I melakukan koordinasi lebih lanjut.				Data spasial	1	Data spasial	Melakukan koordinasi untuk memperbaiki kembali data yang masih belum sesuai standar dan belum lengkap

8	Pusdatin melakukan konfirmasi status publikasi data kepada Unit Unit Eselon I	Selesai			Data spasial	1	Data spasial	Jelas
---	---	---------	--	--	--------------	---	--------------	-------

2. Pengumpulan Data Spasial atas Permintaan Permohonan Produsen Data

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PRODUSEN DATA	UNIT ESELON I	UNIT DATA KEMENTERIAN (PUSDATIN)	Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	
1	Produsen data menginformasikan kepada Unit Eselon I bahwa akan memproduksi data spasial dan menyampaikan data pendukung yang dibutuhkan				Surat	1	Surat	Kebutuhan data yang dimaksud antara lain : - peta rupabumi indonesia - peta tematik dari K/L lain - dan citra satelit
2	Eselon 1 melakukan pengecekan data dan menginformasikan kepada Pusdatin bahwa akan memproduksi data spasial serta menyampaikan data pendukung yang dibutuhkan				Surat	1	Surat	Eselon 1 melakukan pengecekan data yang dimaksud adalah ketersediaan data yang terdapat pada eselon 1
3	Unit Data Kementerian melakukan pengecekan ketersediaan data pendukung yang dibutuhkan Eselon 1 pada warehouse KKP				Data spasial	1	Data spasial	- Melakukan pengecekan terhadap usulan data yang akan diproduksi Eselon 1 dan memeriksa ketersediaan data dari K/L yang dibutuhkan - Apabila data yang dibutuhkan belum tersedia di Pusdatin, Pusdatin akan membantu mengajukan permohonan data yang dibutuhkan kepada K/L terkait
4	Unit Data Kementerian mengirim surat kepada K/L lain untuk mengajukan permohonan data				Surat	1	Surat	Mengirimkan surat permohonan data kepada K/L lain sesuai kebutuhan data yang belum tersedia untuk produksi data spasial
5	Unit Data Kementerian menerima balasan surat dan data dukung dari K/L lain mengenai ketersediaan data				-Surat - Data dukung	1	-Surat - Data dukung	Menerima balasan surat dan data yang dibutuhkan dari K/L lain sebagai bahan untuk memproduksi data spasial
6	Unit Data Kementerian mengunggah data dukung kedalam warehouse KKP				Data spasial	1	Data spasial	Jelas



7	Unit Data Kementerian mengirim surat balasan kepada Unit Eselon I terkait ketersediaan data dukung dan menginformasikan direktori untuk mengunduh data dukung dan direktori untuk upload data spasial yang telah selesai diproduksi				- Surat; - Direktori unduh dan pengumpulan data	1	Surat	Direktori data dukung adalah direktori yang berisi data dari K/L lain yang dibutuhkan Produsen Data; Direktori pengumpulan data adalah direktori yang digunakan untuk mengupload data spasial yang telah selesai diproduksi di satupeta.kkp.go.id
8	Eselon 1 mengunduh data dukung yang tersedia pada direktori yang telah ditetapkan oleh Unit Data Kementerian				Data spasial	1	Data spasial	Jelas

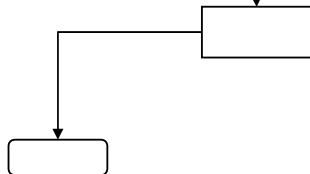
9	Unit Eselon I mengirimkan surat balasan kepada Produsen Data terkait ketersediaan data dukung dan menginformasikan direktori data yang diupload				- Surat; - Direktori unduh dan pengumpulan data	1	Surat	Jelas
10	Produsen Data menghasilkan data kemudian mengunggah pada direktori untuk upload data spasial yang telah selesai diproduksi dilengkapi dengan Metadata dan Kamus data spasial				- Data spasial - kamus data spasial - metadata spasial	100	- Data spasial - kamus data spasial - metadata spasial	Melakukan produksi data spasial sesuai usulan yang disetujui dan data pendukung yang lengkap, dan memastikan langkah produksi data spasial dengan baik seperti : - menyediakan kamus data dan metadata spasial - membuat geodatabase, - menggunakan peta rupabumi indonesia yang terbaru, - menyesuaikan datum dan sistem koordinat.
11	Unit Data Kementerian melakukan pengecekan kelengkapan data spasial yang diproduksi Produsen Data				- Data spasial - kamus data spasial - metadata spasial	2	- Data spasial - kamus data spasial - metadata spasial	Jika data spasial tidak sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan, maka Pusdatin dan Unit Unit Eselon I perlu melakukan koordinasi lebih lanjut. jika sudah sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan (Perpres No.9 Tahun 2016) maka pusdatin akan melakukan konfirmasi status publikasi data
12	Unit Eselon I menyampaikan surat kepada Produsen Data terkait kelengkapan data dan data spasial yang belum standar yang diterima dari Unit Data Kementerian				Surat	1	Surat	Jelas
13	Produsen Data menerima surat terkait kelengkapan data dan data spasial yang belum standar				Surat	1	Surat	Jelas



14	Unit Data Kementerian melakukan konfirmasi status publikasi data kepada Unit Unit Eselon I			Selesai	Data spasial	1	Data spasial	Jelas
----	--	--	--	---------	--------------	---	--------------	-------

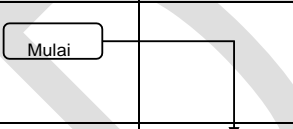
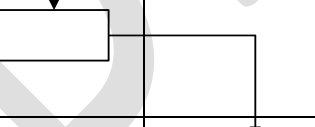
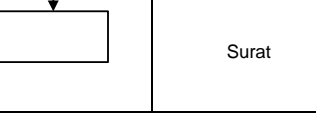
3. Pemuthakiran Data Spasial

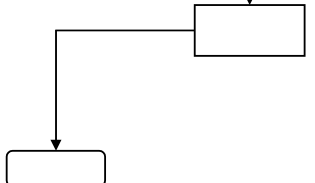
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Produsen data	Unit Data Eselon I	Unit Data Kementerian (PUSDATIN)	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	
1	Produsen Data Mengusulkan pemutakhiran Data Spasial kepada Unit Data Eselon I	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> U1[Unit Data Eselon I] U1 --> U2[Unit Data Kementerian (PUSDATIN)] U2 --> U3[Unit Data Eselon I] U3 --> U4[Unit Data Kementerian (PUSDATIN)] U4 --> U5[Unit Data Eselon I] U5 --> U6[Unit Data Kementerian (PUSDATIN)] </pre>	- Surat - Data spasial yang akan dimutakhirkan	1	- Surat - Upload melalui link direktori	Jelas		
2	Unit Data Eselon I melakukan verifikasi pemutakhiran Data Spasial yang diusulkan oleh Produsen Data				- Surat - Data spasial yang akan dimutakhirkan	1	- Surat - Data Spasial yang sudah di verifikasi	Jelas
3	Unit Data Eselon I menyampaikan Data Spasial yang sudah ter verifikasi kepada Unit Data Kementerian				- Surat - Data spasial yang akan dimutakhirkan	1	- Surat - Data Spasial yang sudah di verifikasi	Jelas
4	Unit Data Kementerian melakukan validasi pemutakhiran Data Spasial yang diusulkan oleh Unit Data Eselon I				- Surat - Data spasial yang akan dimutakhirkan	7	- Surat - Data Spasial yang sudah di verifikasi	sesuai dengan batas administrasi RBI, menyesuaikan datum dan sistem koordinat, dibuat dalam geodatabase, menyediakan meta data dan kamus data spasial



5	Unit Data Kementerian melakukan konfirmasi Data Spasial final dan atribut yang akan di publikasikan pada satupeta.kkp.go.id				- Surat - Data spasial yang akan dimutakhirkan	1	- Surat - Data Spasial yang sudah di verifikasi	Jelas
6	Unit data Eselon I menerima Data Spasial final dan atribut yang akan di publikasikan		Selesai		Data spasial yang dimutakhirkan	1	Data spasial yang dimutakhirkan	Jelas

4. Pemanfaatan dan Penyebarluasan Data Spasial

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Unit Data Kementerian (PUSDATIN)	Unit Data Eselon I	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	
1	Unit Data Kementerian melakukan konfirmasi Data Spasial final dan atribut yang akan di publikasikan pada satupeta.kkp.go.id berdasarkan hasil validasi				- Surat - Data spasial yang akan dimutakhirkan	1	- Surat - Data Spasial yang sudah di verifikasi	Jelas
2	Unit Data Eselon I menyampaikan atribut yang akan di publikasikan kepada internal ataupun eksternal KKP				Surat	1	Surat	surat berisi daftar atribut yang di pubikasikan
3	Produsen Data memilah atribut yang akan dipublikasikan kepada internal ataupun eksternal KKP dan menyampaikan kepada Unit Data Eselon 1				Surat	1	Surat	surat berisi daftar atribut yang di pubikasikan



4	Unit Data Eselon I menyampaikan atribut final yang akan di publikasikan kepada internal ataupun eksternal KKP				Surat	1	Surat	surat berisi daftar atribut yang di pubikasikan
5	Unit Data Kementerian mempublikasikan Data Spasial yang telah dimutakhirkan pada satupeta.kkp.go.id	Selesai			Data spasial yang dimutakhirkan	1	Data spasial yang dimutakhirkan	Jelas

Lembar Pengesahan			
No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Plt.Kapusdatin		
2.	Karo Hukum		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO